

Membangun Desa Batu Tuhup melalui Kolaborasi Multipihak dan Pemberdayaan Masyarakat

Dwi Masitoh¹, Leni Maulida², Syafura Nixie Diva Pamitravati³, Amanda Amelia⁴, Muhammad Nur Fikri⁵, Akhmad Rasyid Ridha⁶, Nurul Hidayah⁷, Muhammad Rizky Syahputra⁸, Wahidah⁹, Rahma Noviana¹⁰, Sofyan Hakim¹¹

Program Studi Pendidikan Agama Islam¹, Program Studi Ilmu Qur'an dan Tafsir², Program Studi Hukum Ekonomi Syariah^{3,5,9}, Program Studi Sejarah Peradaban Islam^{4,10}, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam⁶, Program Studi Tadris Biologi⁷, Program Studi Hukum Tata Negara⁸, Program Studi Akuntansi Syariah¹¹
Universitas Islam Negeri Palangka Raya

e-mail: dwimasitoh2409@gmail.com¹, leni2313130036@fuad.iain-palangkaraya.ac.id², ni.xx.xy@gmail.com³, amandameliacml@gmail.com⁴, muhammadnurfikri909@gmail.com⁵, rasyidsamuda@gmail.com⁶, nuryllhidayah07@gmail.com⁷, mhhdrzky6@gmail.com⁸, wahidahidah777@gmail.com⁹, rahmanovi2401@gmail.com¹⁰, sofyan.hakim@uin-palangkaraya.ac.id¹¹

Abstrak

Pembangunan desa yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antarpihak untuk merespons kebutuhan masyarakat dan memperkuat kapasitas lokal. Pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat serta menganalisis kolaborasi multipihak, partisipasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan program di Desa Batu Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Pengabdian menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* melalui identifikasi kebutuhan, koordinasi, pelaksanaan program, pendampingan, dan observasi yang melibatkan mahasiswa KKN, pemerintah desa, masyarakat, lembaga pendidikan, TPA, Posyandu, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat. Kegiatan mencakup pendidikan, pembelajaran Al-Qur'an, kesehatan, pertanian, lingkungan, kepemudaan, dan kegiatan sosial. Hasil menunjukkan meningkatnya partisipasi dan antusiasme anak serta santri TPA, keterlibatan pemuda yang lebih aktif, partisipasi masyarakat yang lebih kuat, dan berlanjutnya sejumlah kegiatan lokal setelah KKN berakhir. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak dapat memperkuat partisipasi dan mendukung keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Kolaborasi Multipihak, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi, Participatory Action Research, Pembangunan Desa Berkelanjutan*

Abstract

Sustainable village development required collaboration among local actors to respond to diverse community needs and strengthen local capacity. This community service aimed to describe the conditions, potentials, and needs of the community and to examine multiparty collaboration, participation, empowerment, and program sustainability in Batu Tuhup Village, Murung Raya, Central Kalimantan. A Participatory Action Research (PAR) approach was applied through needs identification, coordination, program implementation, mentoring, and observation involving KKN students, village government,

community groups, educational institutions, TPA, Posyandu, youth organizations, and community leaders. The activities addressed education, Qur'anic learning, health, agriculture, environmental activities, youth engagement, and social activities. The results showed increased participation and enthusiasm among children and TPA students, more active youth involvement, stronger community participation, and the continuation of several local activities after the KKN period. The findings indicated that multiparty collaboration strengthened community participation and supported locally sustained empowerment.

Kata Kunci: *Community Empowerment, Multiparty Collaboration, Participation, Participatory Action Research, Sustainable Village Development.*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dengan peran, pengetahuan, dan sumber daya yang berbeda. Pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri sehingga diperlukan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi pemuda, kelompok sosial, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi melalui komunikasi, pembagian peran, transparansi, dan komitmen bersama dapat memperkuat pelaksanaan program serta kapasitas para pihak yang terlibat (Sumiyana *et al.*, 2022). Partisipasi masyarakat juga penting untuk mendukung pembangunan dan layanan yang responsif terhadap kondisi lokal (Handayani *et al.*, 2023).

Kondisi tersebut relevan dengan Desa Batu Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Desa ini memiliki potensi sosial dan kelembagaan berupa lembaga pendidikan, TPA, Posyandu, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Namun, masih terdapat tantangan dalam pengembangan pertanian, mata pencaharian, pendidikan anak, kesehatan masyarakat, dan kondisi kaum muda. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang mampu menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya berbagai pemangku kepentingan lokal.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Keterlibatan tersebut dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat, meskipun tingkat partisipasi berbeda sesuai kondisi sosial dan kelembagaan setempat (Munandar *et al.*, 2023; Nadhiro & Choiriyah, 2024; Sari *et al.*, 2024). Karena itu, partisipasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pemberdayaan yang memberi ruang bagi masyarakat sesuai kemampuan dan kebutuhan lokal.

Dalam pengabdian masyarakat, *Community Service Learning* (CSL) menempatkan mahasiswa sebagai mitra melalui interaksi, pendampingan, fasilitasi, dan pembelajaran kolaboratif. Kegiatan KKN dapat dilakukan melalui penjangkauan, pendampingan, pengorganisasian, dan pengembangan kapasitas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Rochaendi *et al.*, 2024). Pendekatan kolaboratif juga penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat

dan mendukung keberlanjutan kegiatan lokal (Lestariningsih & Chrismartin, 2025).

Meskipun kolaborasi dan partisipasi masyarakat telah banyak dibahas dalam konteks pembangunan desa, kajian mengenai pelaksanaan pengabdian berbasis KKN yang secara khusus memadukan kolaborasi multipihak, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan kegiatan lokal dalam konteks desa dengan sumber daya yang terbatas masih perlu diperkuat. Dalam konteks Desa Batu Tuhup, keberadaan pemerintah desa, lembaga pendidikan, TPA, Posyandu, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum menunjukkan adanya sumber daya lokal yang dapat dihubungkan melalui proses kolaboratif. Oleh karena itu, pengabdian ini tidak hanya mendeskripsikan kegiatan KKN, tetapi juga melihat bagaimana berbagai pihak berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, partisipasi, dan keberlanjutan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengabdian masyarakat di Desa Batu Tuhup difokuskan pada penguatan kolaborasi multipihak untuk mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan mendeskripsikan kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat; bentuk kolaborasi mahasiswa KKN dengan masyarakat; bentuk partisipasi masyarakat; serta kontribusi kolaborasi terhadap pemberdayaan dan keberlanjutan kegiatan di Desa Batu Tuhup.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), karena kegiatan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga mencakup proses mengenali kondisi, menentukan tindakan, melaksanakan kegiatan, dan merefleksikan hasil bersama masyarakat. PAR menempatkan partisipasi sebagai bagian penting dalam proses perubahan sosial (Chevalier & Buckles, 2019).

Kegiatan dilaksanakan di Desa Batu Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada 14 Juli sampai 28 Agustus 2026 dengan melibatkan 10 mahasiswa UIN Palangka Raya. Mitra kegiatan meliputi pemerintah desa, masyarakat, GPD, sekolah, pengelola TPA, Posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat terkait.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahap, yaitu: (1) identifikasi kondisi dan kebutuhan melalui observasi serta komunikasi dengan pemangku kepentingan; (2) koordinasi dan perencanaan melalui penentuan kegiatan dan pembagian peran; (3) pelaksanaan dan pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat; dan (4) pengamatan terhadap perubahan dan keberlanjutan kegiatan berdasarkan informasi serta dokumentasi yang diperoleh setelah KKN berakhir.

Dalam penerapannya, partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada proses identifikasi kebutuhan dan penentuan bentuk kegiatan. Mahasiswa melakukan observasi dan komunikasi

dengan pemerintah desa, pengelola TPA, pihak sekolah, kelompok pemuda, serta masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan lokal. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Selama pelaksanaan, mahasiswa berperan sebagai pendamping dan fasilitator, sedangkan masyarakat dan kelompok lokal dilibatkan sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan. Setelah kegiatan berlangsung, dilakukan pengamatan terhadap respons masyarakat dan keberlanjutan kegiatan sebagai bagian dari refleksi terhadap pelaksanaan program.

Program meliputi pendampingan pendidikan di sekolah, pengajaran Al-Qur'an di TPA, sosialisasi stunting dan pernikahan usia dini, dukungan Posyandu, kebersihan dan gotong royong, pendampingan pertanian, serta kegiatan kepemudaan dan sosial melalui GPD.

Data diperoleh melalui observasi, komunikasi atau wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat, kolaborasi, pembagian peran, partisipasi, perubahan yang teramati, dan keberlanjutan. Pembahasan menggunakan perspektif *Collaborative Governance* (Astuti & Suaedi, 2019) dan PAR (Chevalier & Buckles, 2019). Karena tidak dilakukan pengukuran kuantitatif sebelum dan sesudah program, perubahan akademik dan kesehatan tidak dinyatakan sebagai peningkatan yang terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi, Potensi, dan Kebutuhan Masyarakat Desa Batu Tuhup

Desa Batu Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, memiliki keragaman sosial, ekonomi, pendidikan, agama, kesehatan, dan kelembagaan. Mata pencaharian masyarakat meliputi perdagangan, pertambangan emas, perikanan, pertanian, perusahaan, dan administrasi desa. Keragaman tersebut menunjukkan adanya potensi ekonomi, meskipun tingkat kestabilan mata pencaharian berbeda-beda (Dzikrullooh & Islamudin, 2024).

Desa juga memiliki modal sosial melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan kepemudaan. Keberadaan berbagai kelompok dan organisasi dapat mendukung pemberdayaan serta memperluas partisipasi masyarakat (Wibowo & Lestari, 2024). Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pembangunan dan pemberdayaan di tingkat local (Handayani et al., 2023; Sari et al., 2024).

1. Bidang Pendidikan

Desa Batu Tuhup memiliki fasilitas pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA. Namun, masih ditemukan siswa yang mengalami kesulitan membaca, berhitung, memahami materi, dan mempertahankan perhatian dalam

pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan dukungan, motivasi, dan keterlibatan siswa.

2. Bidang Kesehatan

Posyandu menjadi salah satu kekuatan kelembagaan masyarakat. Namun, masih terdapat anak yang mengalami *stunting*, sehingga kesehatan dan gizi menjadi salah satu perhatian utama. Kebutuhan yang muncul adalah penguatan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan keluarga, gizi, serta pencegahan masalah kesehatan melalui kelembagaan lokal. Intervensi *stunting* juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan pembagian tanggung jawab (Afandi *et al.*, 2023).

3. Pemuda dan Kelembagaan Masyarakat

GPD memiliki pengetahuan mengenai kondisi lokal dan kemampuan menggerakkan pemuda dalam kegiatan bersama. Pendidikan, kesadaran, dan informasi turut mendukung partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (Anggara & Pribadi, 2024). Selain GPD, terdapat PKK, PGRI, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok pengelola lingkungan yang dapat menjadi sumber daya pembangunan. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berlangsung melalui perencanaan dan pengambilan keputusan dengan tingkat partisipasi yang berbeda (Megawati *et al.*, 2024).

4. Bidang Pertanian dan Kebutuhan Masyarakat

Potensi pertanian masih terbatas karena lahan yang kecil dan ketersediaan air pada musim kemarau. Hanya sekitar empat sampai lima orang yang aktif bertani, sehingga pengembangan pertanian perlu disesuaikan dengan kondisi lokal.

Secara keseluruhan, kebutuhan masyarakat Desa Batu Tuhup diarahkan pada penguatan kapasitas dan optimalisasi sumber daya yang telah tersedia. Pendidikan, TPA, Posyandu, organisasi pemuda, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat menjadi aset lokal yang dapat mendukung pemberdayaan dan pelayanan masyarakat (Ardiansyah & Setiawati, 2024).

Pelaksanaan Kolaborasi dan Pemberdayaan di Desa Batu Tuhup

KKN dilaksanakan pada 14 Juli sampai 28 Agustus 2026 dengan melibatkan 10 mahasiswa UIN Palangka Raya. Kegiatan dilakukan bersama pemerintah desa, masyarakat, organisasi pemuda, lembaga pendidikan, pengelola TPA, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lainnya. Kolaborasi tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang telah diidentifikasi.

1. Proses Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Sama

Kolaborasi dilakukan melalui komunikasi, koordinasi, rapat, dan konsultasi antara mahasiswa, masyarakat, pemerintah desa, serta pihak terkait. Jaringan sosial, kepercayaan, dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang mendukung partisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan (Rambe *et al.*, 2025).

Pendekatan ini sejalan dengan *Collaborative Governance* yang menekankan keterlibatan berbagai aktor dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan KKN, mahasiswa berinteraksi dengan pemerintah desa dan kelompok lokal dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan (Astuti & Suaedi, 2019).

2. Pembagian Peran dalam Pelaksanaan Program

Mahasiswa berkontribusi melalui ide, tenaga, pengetahuan, dan pendampingan. Pemerintah desa menyediakan fasilitas, dukungan, dan akses kepada masyarakat. GPD membantu menggerakkan pemuda, sedangkan masyarakat, sekolah, TPA, tokoh agama, dan tokoh masyarakat mendukung melalui tempat, informasi, logistik, dan partisipasi. Pembagian tersebut menunjukkan pemanfaatan sumber daya dari berbagai pihak.

3. Pelaksanaan Program Pendidikan dan Keagamaan

Program pendidikan dilakukan melalui pendampingan pembelajaran di sekolah dengan melibatkan guru sebagai mitra. Di TPA, sekitar 60 santri mengikuti kegiatan membaca Al-Qur'an, hafalan doa dan surah, tanya jawab, serta kegiatan motivasi. Pengelola TPA mendukung penyediaan tempat dan pelaksanaan kegiatan. Dalam PAR, pengetahuan lokal dan keterlibatan peserta menjadi dasar dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat (Chevalier & Buckles, 2019).

Kegiatan TPA menjadi salah satu contoh keberlanjutan program karena kegiatan pembelajaran tetap berlangsung setelah masa KKN berakhir. Keberlanjutan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kegiatan, tetapi juga menunjukkan adanya peran pengelola TPA dan dukungan orang tua dalam mempertahankan aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, kontribusi mahasiswa lebih tepat dipahami sebagai penguatan terhadap kegiatan yang telah dimiliki masyarakat, bukan sebagai pembentukan program yang sepenuhnya baru.

4. Pelaksanaan Program Kesehatan, Sosial, Lingkungan, dan Pertanian

Program kesehatan dilakukan melalui sosialisasi *stunting*, pernikahan dini, dan pendampingan Posyandu. Kegiatan lingkungan dilakukan melalui kebersihan dan gotong royong, sedangkan bidang pertanian melalui pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat. Intervensi *stunting* membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan kepemilikan bersama (Afandi *et al.*, 2023).

5. Pemberdayaan Pemuda melalui Keterlibatan GPD

GPD terlibat dalam kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan melalui persiapan upacara, perlombaan, pembagian hadiah, dan kegiatan masyarakat. Keterlibatan tersebut menjadi bentuk pemanfaatan potensi pemuda dalam kegiatan bersama. Keterlibatan GPD menunjukkan bahwa kelompok pemuda tidak hanya ditempatkan sebagai peserta kegiatan, tetapi juga sebagai pihak yang membantu mengorganisasi dan menggerakkan kegiatan masyarakat. Peran tersebut penting dalam konteks pemberdayaan karena memberikan ruang kepada aktor lokal untuk mengambil tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa dapat berfungsi sebagai

pemicu dan pendamping, sementara penggerakan kegiatan tetap melibatkan kelompok lokal.

6. Kolaborasi sebagai Proses Pemberdayaan

KKN dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan, perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan, dan evaluasi. Komunikasi dan kesepakatan bersama menjadi dasar pelaksanaan program. Kolaborasi tersebut menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak, komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama (Astuti & Suaedi, 2019). Sementara itu, PAR menempatkan mahasiswa dan masyarakat sebagai pihak yang bersama-sama belajar, bertindak, dan melakukan refleksi melalui kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan, pertanian, dan kepemudaan (Chevalier & Buckles, 2019).

Dampak dan Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan KKN menunjukkan perubahan pada bidang pendidikan, keagamaan, kepemudaan, dan partisipasi masyarakat. Beberapa kegiatan juga tetap berlangsung setelah KKN berakhir.

1. Perubahan dalam Kegiatan Pendidikan

Anak-anak menunjukkan keaktifan dan antusiasme dalam pembelajaran setelah memperoleh pendampingan. Namun, perubahan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai peningkatan kemampuan akademik yang terukur karena tidak dilakukan penilaian sebelum dan sesudah kegiatan. KKN dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk berkontribusi melalui pendampingan dan keterlibatan langsung dalam masyarakat (Rochaendi et al., 2024).

2. Perubahan dalam Kegiatan TPA

Sekitar 60 santri mengikuti kegiatan TPA. Selama pendampingan, anak-anak menunjukkan antusiasme dan kepercayaan diri dalam membaca Al-Qur'an, menghafal, dan mengikuti pembelajaran. Kegiatan TPA tetap berjalan dengan dukungan masyarakat dan pengelola setempat.

3. Peningkatan Keterlibatan Pemuda dan GPD

GPD aktif membantu berbagai kegiatan selama dan setelah KKN. Keterlibatan tersebut mendukung kemampuan pemuda dalam berorganisasi, berkomunikasi, berkoordinasi, dan menggerakkan masyarakat. Partisipasi menjadi lebih bermakna ketika masyarakat tidak hanya hadir, tetapi juga terlibat dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan (Sari et al., 2024).

4. Perubahan dalam Partisipasi Masyarakat

Masyarakat berkontribusi melalui tenaga, tempat, informasi, dan dukungan lainnya. GPD menggerakkan pemuda, sekolah menyediakan tempat pembelajaran, dan pengelola TPA mendukung kegiatan Al-Qur'an. Keterlibatan tersebut menunjukkan kontribusi masyarakat sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta mendukung rasa memiliki terhadap kegiatan (Sari et al., 2024). Tingkat partisipasi tetap berbeda sesuai jenis kegiatan, waktu, minat, dan kemampuan masyarakat.

5. Keberlanjutan Program

Setelah KKN berakhir, kegiatan TPA dan pembelajaran Al-Qur'an tetap berjalan, orang tua tetap mendampingi anak, GPD semakin aktif berkoordinasi, dan kegiatan pertanian tetap dilakukan masyarakat. Keberlanjutan tidak hanya ditandai dengan berlanjutnya program mahasiswa, tetapi juga kemampuan masyarakat melanjutkan kegiatan secara mandiri. Kolaborasi, pengembangan kapasitas, dan pemanfaatan sumber daya lokal menjadi unsur penting dalam keberlanjutan program (Lestariningsih & Chrismartin, 2025).

6. Makna Pemberdayaan dan Keberlanjutan Program

Pemberdayaan dilakukan dengan memperkuat kegiatan yang telah ada, seperti sekolah, TPA, Posyandu, kelompok pemuda, pertanian, dan kegiatan sosial. Dalam perspektif PAR, kegiatan tersebut menjadi proses belajar bersama antara mahasiswa dan masyarakat melalui partisipasi, tindakan, refleksi, dan pembelajaran (Chevalier & Buckles, 2019).

Secara keseluruhan, dampak program terlihat dari meningkatnya aktivitas pemuda dan berlanjutnya beberapa kegiatan masyarakat setelah KKN. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari penerimaan dan kemampuan masyarakat untuk melanjutkannya secara mandiri.

SIMPULAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat melalui KKN di Desa Batu Tuhup menunjukkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat diperkuat melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, kelompok pemuda, lembaga pendidikan, pengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Posyandu, serta mahasiswa. Kolaborasi tersebut tidak hanya mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, kepemudaan, lingkungan, dan sosial, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terlibat sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam prosesnya, mahasiswa tidak ditempatkan sebagai pelaksana utama seluruh kegiatan, melainkan sebagai mitra dan fasilitator yang membantu memperkuat kegiatan serta potensi yang telah berkembang di masyarakat. Pola tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan menjadi lebih bermakna ketika masyarakat terlibat secara aktif dan memiliki ruang untuk mengambil peran dalam pelaksanaan kegiatan.

Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya perubahan positif yang teramati pada keterlibatan masyarakat, khususnya meningkatnya partisipasi pemuda, dukungan orang tua terhadap kegiatan pendidikan dan keagamaan, serta keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam mendukung program. Keberlanjutan juga terlihat dari tetap berlangsungnya beberapa kegiatan setelah KKN berakhir, seperti kegiatan TPA dan pembelajaran Al-Qur'an, keterlibatan orang tua dalam pendampingan anak, aktivitas kelompok pemuda, serta kegiatan pertanian yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dilaksanakan selama KKN, tetapi terutama oleh

kemampuan masyarakat dan aktor lokal untuk menerima, mengelola, dan melanjutkan kegiatan secara mandiri. Dengan demikian, kolaborasi multipihak yang dibangun melalui pendekatan partisipatif dapat menjadi salah satu strategi dalam memperkuat kapasitas lokal dan mendukung keberlanjutan pembangunan Desa Batu Tuhup.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative governance in a mandated setting: Shifting collaboration in stunting interventions at local level. *Development Studies Research*, 10(1), 2212868. <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Anggara, R., & Pribadi, U. (2024). Community Participation in Village Deliberations: Examining the Dynamics of Influencing Factors. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 8(1), 85-95. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i1.78113>
- Ardiansyah, H., & Setiawati, R. (2024). Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(2), 461-468.
- Astuti, S. J. W., & Suaedi, F. (2019). Building Independent Villages through Collaborative Governance by Village-Owned Enterprises (Best Practice from Panggungharjo Village, Central Java, Indonesia). *IAPA Proceedings Conference*, 265-279. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2018.200>
- Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). *Participatory Action Research: Theory and Methods for Engaged Inquiry* (2nd ed.). Routledge.
- Dzikrulloh, R. R., & Islamudin, M. M. (2024). Kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa wisata budaya Pasar Keramat. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(8), 463-469. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/8057>
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, 100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Lestariningsih, T., & Chrismartin, P. Y. (2025). Model Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Durensewu Pandaan. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 6(2), 124-133. <https://doi.org/10.30596/jisp.v6i2.22276>
- Megawati, S., Pratama, A. C., Sajida, R. H., & Rahaju, T. (2024). Community participation in preparing the village government working plan. *IAPA Proceedings Conference*, 975-989. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1172>
- Munandar, A., Nurholizah, S., Artika, D. T., Mahroja, S., Nurholizah, R., Anggraini, M., & Adetya, A. F. (2023). Evaluasi Program Pendidikan: Tinjauan terhadap Efektivitas dan Tantangan. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 45-56. <https://pdfs.semanticscholar.org/6a7b/681a4ee12578a5536ff100c9793ec764ee6a.pdf>

- Nadhiro, R. A., & Choiriyah, I. U. (2024). Community Participation in Village Development Planning: Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1), 10–21070. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1366>
- Rambe, J. Y., Tampubolon, R. A., Andarini, D., Ramadhona, E. S., & Nasution, S. P. (2025). Peran Modal Sosial dalam Pembangunan Desa di Desa Rimba Soping Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan. *Jurnal Education and Development*, 13(1), 473–478. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/7097>
- Rochaendi, E., Ariyani, Y. D., Sari, I. P., Mahfud, M., Kholik, N., Rouzi, K. S., & Nazibi, Z. (2024). Pelaksanaan KKN-Tematik: Mengoptimalkan Diseminasi Pembangunan Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 75–92. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v6i1.1003>
- Sari, N., Parawu, H. E., & Taufik, A. (2024). Strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 107–121. <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15459>
- Sumiyana, Wivaqussaniyyah, Darwin, M., & Hadna, A. H. (2022). Partnership building between NGOs and Indonesian local governments: A case study of integrative leadership immersing itself in innovativeness. *International Journal of Social Economics*, 49(7), 1029–1048. <https://doi.org/10.1108/IJSE-07-2021-0377>
- Wibowo, A., & Lestari, E. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Modal Sosial dan Peran Stakeholder dalam Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Penyuluhan*, 20(1), 148.